BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang berhubungan dengan ketentuan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana berbasis *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* sudah ada namun peraturan tersebut belum secara efektif. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan substansi mengenai manipulasi sebuah gambar atau video dengan sistem AI berupa *deepfake* di dalam peraturan tersebut hanya mengatur sebuah gambar atau video yang bermuatan kesusilaan secara riil tanpa manipulasi dari bantuan sistem lain. Sedangkan dalam aturan tersebut juga tidak memberikan suatu batasan yang secara jelas mengenai *deepfake*.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* di Indonesia harus bersifat konkrit dan tegas dengan melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *artificial intelligence* (AI) yang didalamnya mengenai ketentuan batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan sistem kerja dari kecerdasan buatan termasuk *deepfake* itu sendiri. Sehingga, membuat suatu regulasi dengan mengkategorikan *deepfake* melalui AI sebagai tindakan kriminal yang mempunyai sanksi yang berat, batasan-batasan dalam penggunaan AI, serta menjalankan kebijakan dengan mengatur mengenai segala upaya-upaya menindak penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan hukum positif Indonesia sudah ada mengatur terkait dalam hal *deepfake* karena mempunyai unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun, mengenai *deepfake* itu sendiri belum ada ketentuan yang jelas, sehingga perlu adanya perbaikan atau penambahan peraturan khusus yang berkaitan dengan *deepfake* dalam hal ini memberikan substansi yang jelas dan juga kepastian hukum perlindungan korban penyalahgunaan AI.
2. Kebijakan pengaturan mengenai *artificial intelligence* (AI) yang berkaitan dengan *deepfake* harus diatur secara tegas yang mengatur sanksi pidana dalam *deepfake* yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut serta memberikan hak-hak yang harus didapat korban disebabkan perbuatan yang terjadi baik itu hak-hak yang tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun memberikan bantuan psikologis sosial supaya korban tersebut tidak mengalami ketakutan dalam bermasyarakat serta memberikan pencegahan terhadap kriminalisasi pada korban.